

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan kesenjangan distribusi pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, semakin tinggi upah minimum, dampaknya tidak dapat menurunkan kesenjangan distribusi pendapatan.
2. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi pula kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, semakin tinggi jumlah penduduk miskin, maka semakin tinggi pula kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Jumlah keluarga penerima manfaat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, semakin tinggi Jumlah keluarga penerima manfaat, maka

tidak dapat menurunkan kesenjangan pendapatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan topik tersebut,

1. Pemerintah perlu menetapkan upah minimum berdasarkan produktivitas dan kebutuhan hidup layak, serta memperkuat pengawasannya agar merata di seluruh sektor dan wilayah.
2. Pemerintah perlu meningkatkan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak di seluruh wilayah untuk memperkuat Indeks Pembangunan Manusia secara merata agar dapat menurunkan kesenjangan distribusi pendapatan.
3. Pemerintah perlu memperkuat program pengentasan kemiskinan secara terarah, serta peningkatan akses untuk pendidikan dan lapangan kerja.
4. Pemerintah perlu melanjutkan program bantuan sosial dengan evaluasi berkala, tetapi juga memastikan pelaksanaannya tetap terkontrol dan tepat sasaran agar efektivitasnya tetap terjaga.